

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN
SUKARELA LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)**

**Oleh :
Firstcilia Eldy Putri
Pembimbing : Yuneita Anisma dan Al Azhar A**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : firstciliaeldyputri@gmail.com

*Effect of The Presenting of Regional Financial Report, Accessibility of Regional
Financial Report and Level of Regional Financial Report Voluntary
Explanation to Accountability of Regional Financial
(Empirical Studies on SKPD at Riau Province)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the presenting of regional financial report, accessibility of regional financial report and level of regional financial report voluntary explanation to accountability of financial. The population of research is SKPD in Provincial Government of Riau. This study is using primer data. Data analysis for hypothesis test was done with Statistical Product and Service Solutions (SPSS). There are 93 questionnaires were sent, but only 87 questionnaires are returned. The variables were examined presenting of regional financial report, accessibility of regional financial report and level of regional financial report voluntary explanation to accountability of financial. The results of this research showed presenting of regional financial report has an effect to the accountability of financial with 0,004 significance, accessibility of regional financial report has an effect to the accountability of financial with 0,025 significance and level of regional financial report voluntary explanation has an effect to the accountability of financial with 0,000 significance. The results of this research also showed that coefficient R square is 56,2%. Each independent variables, gives the strong influence to dependent variable, it means independent variables could explain dependent variable well. While the remaining influenced by other variables not included in the regression models were not included in this study. All variables also have strong relation with variable dependents in this research.

Keywords: presenting, accessibility, level of voluntary explanation, accountability

PENDAHULUAN

Pada saat reformasi yang berlangsung di Indonesia, masyarakat menuntut agar

pemerintah mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Otonomi daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tiga misi utama otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2006:20). Perhatian terhadap isu akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat, hal ini disebabkan dua faktor yaitu krisis ekonomi yang telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan desentralisasi fiskal dari pemerintah. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini pun berdasarkan dari Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah pada Provinsi Riau Tahun anggaran 2014 pada semester I tahun 2015 yang menyatakan bahwa Laporan Pengawasan ini akan menjadi bahan koreksi bagi Pemerintah Provinsi Riau yang disampaikan Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekda Provinsi Riau, Zaini Ismail. (sumber: www.bpkp.go.id)

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Riau menjelaskan secara singkat atas laporan pengawasan yang disajikan secara sistematis dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam perspektif, yaitu: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas

Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset, Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dan Akuntabilitas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Lintas Sektor. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan di wilayah Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan, hal ini terlihat dari perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di wilayah Riau.

Sementara untuk Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset baru ada 3 (tiga) Pemda yang tepat waktu dalam pengesahan APBD, sementara 10 Pemda lainnya mengalami keterlambatan dan sampai dengan saat ini masih ada 2 (dua) Pemda yang masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya sinergisme di antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan dan penerapan Raperda APBD. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK juga menyampaikan untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi dan Kota Pekanbaru. (Sumber: Tim Humas BPKP Riau, www.bpkp.go.id/riau).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan daerah, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan

keuangan tetapi berhak menuntut pertanggung jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Aplikasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya sehingga program tersebut dapat memberikan hasil dan dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerja sama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam

memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Pendapat lainnya diungkapkan yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Sukhemi (2010) juga meneliti mengenai proses untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Proses akuntabilitas ini ternyata mengalami perjalanan yang sangat panjang hal ini dibuktikan dengan saluran untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang dimulai dari pelayan masyarakat kemudian menuju ke arah Menteri, Parlemen, Pengadilan, dan menuju ke arah masyarakat.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun di daerah (Mardiasmo, 2006). Laporan keuangan inilah yang merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan pada *stakeholder* adalah juga merupakan kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam penelitian ini penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan

akuntabilitas (Nordiawan,2010:44). Hal ini juga diungkapkan menurut Bastian (2006:68) yang menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggung jawaban publik melalui laporan keuangannya.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami, Mardiasmo (2006).

Reformasi dan regulasi yang terkait dengan penyajian laporan keuangan daerah, ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri atas: Laporan perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat diamati di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkungan pemerintah daerah.

Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry*

merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Karakteristik kualitatif informasi dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), antara lain: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas. Penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan mendapatkan hasil yang berbeda dari tiap penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Peggy Sande tahun 2013 dengan judul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah provinsi Sumatera Barat dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel independen berupa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah? 2) Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap

akuntabilitas laporan keuangan daerah? 3) Apakah tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. 3) Untuk menguji dan menganalisis tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

TELAAH PUSTAKA

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik didalam organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi kepada pihak manajemen untuk memberikan informasi kepada publik salah satunya adalah informasi keuangan dan akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2006:24).

Pengungkapan atas informasi didalam laporan keuangan merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan yang merupakan hal penting didalam organisasi sektor publik (Diamond, 2007). Menurut PP No.71 tahun

2010 dalam pernyataan standarnya akuntansi pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49 menyatakan bahwa neraca pada laporan keuangan pemerintah harus mencantumkan sekurang-kurangnya kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Arti aksesibilitas itu sendiri sangat melekat pada pentingnya masyarakat dalam memperoleh kemudahan untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan.

Pengertian aksesibilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mardiasmo, 2006). Laporan keuangan yang disajikan pemerintah harus dapat dimengerti dan dapat diakses bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahami laporan keuangan yang tersedia.

Pernyataan pemerintah yang dimuat dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa data terbuka yang dapat diketahui, informasi yang diakses dan diperoleh oleh masyarakat dimuat dalam Sistem

Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* dan para pemakai laporan keuangan lainnya secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya mempublikasikan informasi laporan keuangan melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

SKPD merupakan pihak pada pemerintah daerah yang harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah disebutkan pada Undang-undang No. 22 dan No. 25 tahun 1999. Paradigma baru tersebut menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah yang isinya berupa tuntutan untuk dilakukannya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan

Pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh pemerintah di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pemerintah yang berlaku. Pemerintah memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela oleh pemerintah.

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah dan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami pencapaian kinerja pemerintah. Dalam konteks pengungkapan sukarela, pemerintah bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi lainnya yang dianggap relevan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh pemakai laporan tahunan.

Laporan keuangan yang harus diungkapkan harus dapat melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Ia juga mengemukakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diatur dalam undang-undang yang sedang mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, yang mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada para pemegang saham, pemerintah sendiri, dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut yakni DPR dan masyarakat luas.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang berhak untuk meminta keterangan terhadap pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan memenuhi karakteristik kualitatif dalam penyajian laporan keuangan.

Pemerintah daerah bertindak sebagai pihak penerima amanah dan berkewajiban dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil rakyat. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Sehingga semakin baik penyajian laporan keuangan akan semakin jelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan haruslah akurat, relevan, dan andal untuk menciptakan akuntabilitas keuangan yang dapat digambarkan melalui transparansi yang dilakukan pemerintah (Nordiawan, 2010:73), peningkatan terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah.

H1: Diduga Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Bentuk Akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah tergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggung jawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Bentuk akuntabilitas keuangan daerah juga diwujudkan dengan demokrasi terbuka yaitu, akses yang diberikan kepada media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Bila dalam penyajian laporan keuangan tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan kepada lembaga legislatif serta badan pengawasan yang telah memberikan kepercayaannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Pemerintah daerah maupun SKPD dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik. Selain itu laporan keuangan tersebut hendaknya mudah diperoleh masyarakat dengan biaya yang dapat terjangkau. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah (Mardiasmo,2006:84). Hak publik atas informasi keuangan timbul karena konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik.

H2: Diduga Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerinatah Daerah Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Tingkat pengungkapan laporan keuangan merupakan keseluruhan informasi yang diungkapkan secara rinci yang jelas dan ada didalam laporan keuangan. Seluruh kejadian, analisis manajemen dan informasi tambahan diluar biaya historis yang dapat memberikan pertimbangan untuk mengungkapkan informasi secara jelas harus dipaparkan didalam laporan keuangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diperlihatkan

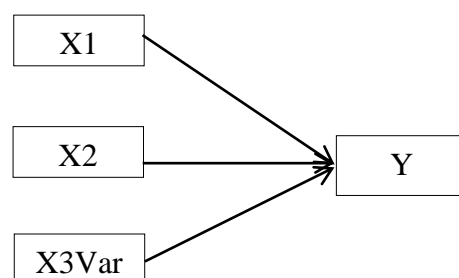
melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan yang menekankan pada ukuran dan pengevaluasian kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan.

Tingkat pengungkapan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh pemerintah di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pemerintah yang berlaku. Pemerintah memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela oleh pemerintah.

H3: Diduga tingkat pengungkapan sukarela Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Model Penelitian

Berikut ini adalah model penelitian dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:



Sumber: *Data Olahan, 2016*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada SKPD Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria Kepala Dinas, Kasubag Keuangan dan Bendahara. Kriteria ini didasarkan bahwa tiap – tiap pihak tersebut memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan instrument yang menggunakan kuesioner kepada SKPD.

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*).

Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan / tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Merupakan sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013:87).

Definisi Operasionalisasi Variabel

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif

laporan keuangan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder.

Tingkat pengungkapan adalah informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan daerah yang diadopsi menurut PSAP No. 12 tahun 2008. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dilaporkan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Seluruh item pertanyaan pada kuesioner penelitian ini memiliki nilai signifikan < 0,05 yang artinya bahwa alat ukur yang digunakan valid.

Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* masing-masing variabel adalah > 0,06.

Tabel 1
Hasil Uji Realibilitas Data

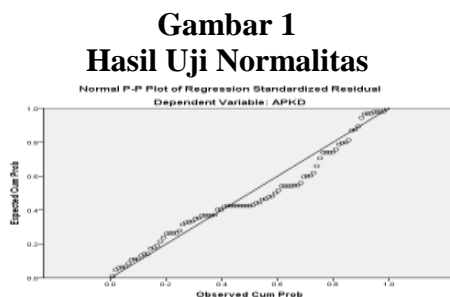
No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Kritis
1	Y	0,778	0.6
2	X1	0,728	0.6
3	X2	0,671	0.6
4	X3	0,716	0.6

Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Didalam penelitian ini disajikan dalam graifik P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau maka model regresitidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar penelitian ini untuk menunjukan normalitas data dari suatu penelitian.



Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, nilai toleransi yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat di justifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Nilai yang disajikan dalam uji multikolonieritas digunakan untuk melihat apakah masing-masing vaiabel independen memiliki

kesamaan dengan variabel independen lainnya dan menghindari adanya kesamaan atas kesalahan peenggangu yang terjadi untuk masing-masing variabel independen untuk terbebas dari mutikolonieritas didalam penelitian. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

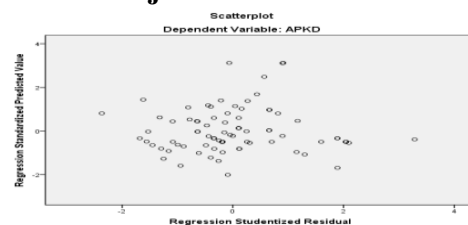
Variabel	Tolerance	VIF
X1	.776	1.288
X2	.792	1.263
X3	.846	1.183

Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber :Data Olahan, 2016

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur peengaruh atau tidaknya:

$$APKD = 9,587 + 0,341X1 + 0,348X2 + 0,998X3 + e$$

- Nilai konstanta (α) sebesar 9,587. Artinya adalah apabila variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan

keuangan dan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah diasumsikan nol (0), maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 9,587.

- Nilai koefisien regresi penyajian laporan keuangan sebesar 0,341. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penyajian laporan keuangan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,341.
- Nilai koefisien regresi aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,348. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,348.
- Nilai koefisien regresi tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan sebesar 0,998. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,998.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil uji hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

Hasil Uji Hipotesis 1

Variabel	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	H
(Constant)	9,587				
PLK	0,341	2,969	1,988	0,004	Diterima

Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada

didapat nilai t_{hitung} senilai 2,969. Nilai t_{tabel} sebesar 1,988, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 84 (n-banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,969 > t_{tabel} 1,988$. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, dalam tabel 3 didapat nilai Sig. $0,004 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Peggy Shande (2013) yang mengatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Hasil uji hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Hasil Uji Hipotesis 2

Variabel	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	H
(Constant)	9,587				
ALK	0,348	2,688	1,988	0,025	Diterima

Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,688. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,688 > t_{tabel} 1,988$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima**.

Sementara itu, dalam tabel 4 didapat nilai Sig. $0,025 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukhemi (2010) tentang aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hasil Pengujian Hipotesis H₃

Hasil uji hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 5

Hasil Uji Hipotesis 3

Variabel	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	H
(Constant)	9,587				
TPSLK	0,998	7,036	1,988	0,000	Diterima

Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 5 didapat nilai t_{hitung} senilai 7,036. Dengan demikian diketahui t_{hitung} 7,036 > t_{tabel} 1,988. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan **H₃ diterima** Sementara itu, dalam tabel 5 didapat nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukhemi (2012) tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan berpengaruh sebesar 56,2% terhadap variabel dependennya yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku menunjukkan bahwa pemerintah selaku pengelola dana publik menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya.
- 2) Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti, kemudahan yang dirasakan oleh publik dalam mengakses laporan keuangan yang ada akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- 3) Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan menunjukkan usaha pemerintah dalam mengungkapkan seluruh informasi yang ada dan menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada satu SKPD, namun dapat menambahkan SKPD lainnya yang berada di Kota / Kabupaten Provinsi Riau, sehingga lebih dapat digeneralisasikan.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti menambahkan variabel independen atau menggunakan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel transparansi pelaporan keuangan daerah dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.
- 3) Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara

langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian..

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Diamond. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Partial Least Square*. Edisi kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2, No.1, pp.1-17.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Undang-undang No. 15 tahun 2004
Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung
jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
59 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh
Penyajian Laporan
Keuangan Dan Aksesibilitas
Laporan Keuangan Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah (Studi
Empiris Pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat)*.
Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang.
- Sukhemi. 2010. *Pengaruh Penyajian
Neraca Daerah Terhadap
Akuntabilitas Keuangan
Daerah. Akmenika Jurnal
Akuntansi dan Manajemen*.
Volume 5, April: 85-100.
2012. *Pengaruh Aksesibilitas
Dan Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Terhadap
Akuntabilitas Keuangan
Daerah. Akmenika Jurnal
Akuntansi dan Manajemen*.:
286-293.

<http://www.bpk.go.id>

